

# ETIKA ISLAM

## (Sebuah Kajian Sintesis Multidisipliner)

*Nur Rahmad Yahya Wijaya*  
Dosen Stit Al-Karimiyyah

### *Abstract*

Tulisan ini merupakan penelusuran terhadap ukuran etis bagi perbuatan moral yang dicari lewat berbagai kajian, baik dari Barat, maupun dari Islam sendiri. Pertanyaannya adalah apa ukuran yang paling tepat bagi perbuatan moral? Dan, apakah penjelasannya dapat ditelusuri hanya melalui akal saja, ataukah juga memerlukan penjelasan dari wahyu? Kajian Etika Islam ini bukan hanya menguraikan perdebatan di dalam wacana Filsafat Barat, tetapi juga Filsafat Islam; bukan hanya di dalam Etika Barat, tetapi juga di dalam bidang Etika Islam klasik yang termuat di dalam perdebatan teologis *Ilm al-Kalam* dan Filsafat Islam Abad Pertengahan. Selanjutnya, kaidah kedaruratan *Usul al-Fiqh* dan Etika Teleologis dapat memberikan penjelasan bagaimana kasus-kasus pelik dan dilematis di dalam realitas pengalaman empiris dapat diselesaikan. Kajian Etika Islam ini disebut multidisipliner karena menggunakan berbagai pendekatan melalui berbagai disiplin keilmuan, dan disebut sintesis karena mengambil ide-ide terbaik yang ditawarkan di dalam pemikiran-pemikiran etika yang dibahas di dalam tulisan ini, dan menggabungkannya menjadi suatu kesatuan yang utuh dan padu.

**Keywords:** *Etika, Sintesis dan Multidisipliner*

### **Pendahuluan**

Di dalam etika Barat, ukuran perbuatan moral ditelusuri melalui kerangka baik-buruknya perbuatan melalui konsekuensinya, atau benar-salahnya menurut prinsip-prinsip universal, objektif, dan etis. Namun demikian, kedua aliran Etika Teleologis dan Etika Deontologis yang saling bertolak belakang ini tidak mampu memberikan penjelasan mengenai dasar perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berlaku moral. Etika Teologis mengisi kekosongan kedua doktrin

sebelumnya, dan menegaskan bahwa otoritas eksistensial yang berwibawa ini hanyalah Tuhan Yang Maha Baik, dan karena Dia juga merupakan sumber kebaikan. Tetapi, Etika Teologis gagal mempertahankan doktrin tentang Kebaikan Tuhan, dan di dalam sistemnya sendiri tidak dapat menunjukkan kriteria apa yang menentukan kebaikan dan keburukan, persis seperti yang dikehendaki Tuhan.

Etika, dengan demikian, berhajat pada penjelasan wahyu, dan Alquran beserta Sunnah Nabi-Nya merupakan pedoman etika yang lengkap di dalam sistemnya sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa perbuatan moral bukan hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip universal etika, tetapi juga sekaligus sesuai dengan Perintah Allah, karena Dia sendirilah yang menciptakan akal manusia untuk dapat menangkap kebenaran, Dia juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang diciptakan-Nya itulah Perintah-Nya sesuai dengan Kebenaran-Nya.

Di dalam realitas pengalaman manusia yang empiris, kasus-kasus moral yang pelik dan dilematis dapat saja terjadi. Etika teoretis tidak sepenuhnya dapat memberikan solusi, dan etika praktis dapat memberikan penjelasan. Bagaimanapun juga, di dalam Etika Islam, kasus-kasus apapun dapat diselesaikan melalui sumber kewahyuan Islam. Penjelasan dari luar Islam bukannya tidak bermanfaat, tetapi penjelasannya bukanlah secara primer, melainkan secara sekunder.

### **Sejarah Munculnya Etika**

Para filsuf pra-Sokrates memiliki keheranan yang luar biasa terhadap alam dan kejadian-kejadiannya. Mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian khusus terhadap kenyataan yang beraneka ragam dan perubahan yang terus-menerus yang tersaksikan di dalamnya. Mereka berkeyakinan bahwa di balik semua kenyataan dan perubahan itu terdapat suatu asas atau prinsip yang tetap. Meskipun terdapat segala kenyataan dan perubahan, bagi pikiran mereka, dunia jasmani merupakan suatu keseluruhan yang teratur dan *ajeg*, dan kejadian-kejadian alamiah memiliki suatu ketetapan. Pertanyaan mereka adalah: Apakah asas pertama itu? Atau apa sifat terakhir dari semua itu? Apakah masing-masing adalah hakikat yang berdiri sendiri, atautkah hanyalah pernyataan atau perwujudan dari suatu realitas yang

tersembunyi?<sup>1</sup> Terhadap satu macam pertanyaan di dalam bidang yang disebut 'ontologi' ini, mereka memberikan jawaban yang beraneka ragam.<sup>2</sup>

Karena fakta inilah, barangkali, yaitu bahwa dari satu pertanyaan yang sama dapat dijawab dengan berbagai jawaban yang beragam, kelompok Sofis menyebarkan skeptisme dan relativisme.<sup>3</sup> Mereka memang menyatakan krisis yang tampak dalam pemikiran Yunani. Rupanya, pada waktu itu, orang merasa jemu dengan sekian banyak rentetan pendirian filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf sejak Thales, yang disebut prasokratik. Reaksinya adalah skeptisme yang dianut oleh kelompok Sofis ini. Kebenaran diragukan dan dasar-dasar pengetahuan dan ilmu digoncangkan. Banyak nilai tradisional dalam bidang agama dan moralitas mulai diragukan.<sup>4</sup> Plato (428/7-348/7 SM) pernah mengira bahwa kota Athena akan hancur pada abad ke-4 SM akibat skeptisme yang keras dari kelompok Sofis dan ketidakstabilan masyarakat pada waktu itu.<sup>5</sup> Namun, jasa mereka yang terbesar adalah bahwa justru karena merekalah kelahiran filsafat baru dipersiapkan. Sokrates, Plato, dan Aristoteles akan merealisasikan filsafat baru tersebut,<sup>6</sup> dan satu di antaranya adalah berkaitan dengan cabang filsafat yang disebut sebagai 'epistemologi'.

Sokrates tidak menyepakati relativisme yang dianut oleh kelompok Sofis. Menurutnya, ada kebenaran objektif, yang tidak tergantung pada aku atau pada kita. Keyakinannya ini, namun begitu, tidak dapat ditilik dari sudut teoretis, atau epistemologis. Dalam hal ini, ia hanya memperhatikan hidup praktis saja, yaitu tingkah laku manusia.<sup>7</sup> Ia memang mencurahkan perhatiannya pada cabang filsafat yang disebut sebagai 'etika'.<sup>8</sup> Namun begitu, bertentangan dengan Protagoras dan kelompok Sofis lainnya, Sokrates hendak menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Baginya, "yang baik" itu tidaklah relatif. "Yang baik" memiliki nilai yang sama bagi semua manusia.<sup>9</sup> Baginya, bukan sembarang perbuatan dapat disebut baik; ada perbuatan yang baik dan tidak baik; ada

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 9; Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku III: Pengantar kepada Metafisika* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 288.

<sup>2</sup> Baca misalnya K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 33-77; K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, 9-11; Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku III...*, 288-289.

<sup>3</sup> Baca misalnya K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 83-93.

<sup>4</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 93.

<sup>5</sup> Dave Robinson dan Chris Garrat, *Mengenal Etika: For Beginners*, terj. Agus Salim dan Faizah Sari (Bandung: Mizan, 1998), 3.

<sup>6</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 93.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 104, 107.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 107, 108.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 111.

perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Ia meyakini bahwa perbuatan buruk adalah suatu kemalangan, dan perbuatan baik adalah suatu kebahagiaan bagi seorang manusia. Ia, karenanya, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah itu hidup yang baik? Apakah kebaikan itu, yang mengakibatkan kebahagiaan bagi seorang manusia? Apakah norma yang mengizinkan manusia menetapkan baik-buruknya suatu perbuatan?<sup>10</sup> Pertanyaan terakhir dari Socrates ini, yaitu tentang norma atau ukuran etis, akan menjadi pembahasan selanjutnya.

### **Pengertian Etika, Ukuran-ukuran Etis, dan Aliran-aliran Etika**

Istilah ‘etika’ dan ‘moral’ memiliki hubungan erat dengan arti asalnya. Istilah ‘*moral*’ (moral, susila) berasal dari bahasa Latin: *moralis*, dan istilah ‘*ethics*’ (etika) berasal dari bahasa Yunani: *ethos*, yang keduanya berarti ‘kebiasaan atau cara hidup’. Kedua istilah ini terkadang digunakan sebagai sinonim. Namun, sekarang, kata ‘*morality*’ (moralitas, kesusilaan) digunakan untuk menunjukkan perbuatan, sedangkan ‘*ethics*’ menunjuk pada penyelidikan tentang perbuatan. Bandingkan, misalnya, perbedaan penggunaan dua istilah ini: ‘*moral act*’ (perbuatan moral) dan ‘*ethical code*’ (aturan etis).<sup>11</sup> Pembahasan pokok di dalam etika sendiri sebenarnya membicarakan predikat-predikat nilai ‘benar’ (*‘right’*) dan ‘salah’ (*‘wrong’*) dalam arti susila atau moral (*‘moral’*) dan asusila atau imoral (*‘immoral’*).<sup>12</sup> Dengan begitu, ‘perbuatan moral’ mengacu pada perbuatan yang benar atau susila; dan ‘aturan etis’ menunjuk pada aturan yang sesuai dengan penyelidikan (filsafati) tentang perbuatan. Walau begitu, perilaku moral tidak hanya menyangkut perbuatan dalam kerangka benar, tetapi juga baik. Analisa etis cenderung dan berpusat pada dua istilah ini: benar atau baik.<sup>13</sup>

Jika etika mendasarkan dirinya pada dua kata kunci ini, maka lahirlah dua aliran besar etika. Aliran yang *pertama*, disebut Etika Deontologis atau Etika Formalistis, mendasarkan dirinya pada benarnya suatu perbuatan.<sup>14</sup> Kata “benar” (Inggris: *right*) berasal dari bahasa Latin, “*rectus*” yang berarti lurus, dan di dalam pemakaian biasa mengandung arti “sesuai dengan suatu ukuran”.<sup>15</sup> Jika kebenaran dianggap sebagai kata kunci perbuatan moral, maka etika berkiblat pada ide

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>11</sup> Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 141. Selanjutnya akan ditulis Harold H. Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*.

<sup>12</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 341.

<sup>13</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), 217.

<sup>14</sup> Bandingkan *ibid.*, 218.

<sup>15</sup> Harold H. Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, 141.

kewajiban dan tugas, berkisar pada pernyataan tentang prinsip-prinsip perbuatan, dan bukan pada penelusuran konsekuensi-konsekuensi. Etika yang menjadikan kebenaran sebagai ukuran perbuatan moral ini disebut deontologis (karena menekankan kewajiban), atau formalistis (karena menekankan prinsip).<sup>16</sup> Pendapat ini menyatakan bahwa di dalam bidang etika, benar atau salah itu tidak dapat diperas menjadi sesuatu yang lain, tetapi dapat dimengerti secara langsung.<sup>17</sup> Di sini, jika suatu perbuatan secara prinsip dianggap sebagai perbuatan yang benar, maka, perbuatan itu wajib dilakukan, tanpa mempertimbangkan, atau terlepas dari, konsekuensi dari perbuatan tersebut, baik atau buruk.

Aliran yang *kedua*, disebut Etika Teleologis atau Etika Aksiologis, bertentangan dengan yang sebelumnya, menjadikan kebaikan sebagai ukuran perbuatan moral.<sup>18</sup> Kata “baik” (Inggris: *good*) menunjuk pada sesuatu yang mempunyai kualitas yang diinginkan, memuaskan suatu hajat, dan bernilai bagi manusia.<sup>19</sup> Teori etika yang dihasilkannya ditandai dengan kepenuhan nilai, karena kebenaran menjadi satu aspek dari kepenuhan tersebut, yaitu seperangkat kewajiban kepada yang lain yang mesti dihormati dalam pencapaian kebaikan. Aliran etika ini berkiblat pada maksud atau tujuan akhir (karenanya disebut teleologis), atau mendasarkan dirinya pada nilai (karenanya disebut aksiologis) dari perbuatan yang mengarah pada kebaikan manusia.<sup>20</sup> Suatu perbuatan itu benar atau salah dalam hubungannya dengan maksud atau tujuan yang dianggap baik.<sup>21</sup> Tindakan yang benar, menurut aliran ini, harus memberi sumbangan bagi kebaikan manusia dan dunia.<sup>22</sup>

Ada tiga aliran yang bisa dimasukkan ke dalam Etika Teleologis: Hedonisme, Epicureanisme, dan Utilitarianisme. Ketiganya sepakat bahwa ukuran perbuatan moral adalah kebaikan. Namun, mereka berselisih dalam menafsirkan apa yg dimaksud dengan kebaikan.

Cabang *pertama* Etika Teleologis adalah Hedonisme yang didirikan oleh Aristippos (435-355 SM). Aristippos, sebagai pengikut Socrates, menyetujui pendapat guru yang diikutinya bahwa keutamaan adalah mencari yg "baik". Tetapi, ia mengartikan yang baik sebagai "kesenangan" (*hedone*), maksudnya adalah kesenangan badani. Namun begitu, kata Aristippos, orang bijaksana tidak

---

<sup>16</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 218.

<sup>17</sup> Harold H. Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, 141.

<sup>18</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 218.

<sup>19</sup> Harold H. Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, 141.

<sup>20</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 218.

<sup>21</sup> Harold H. Titus dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, 147.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 141.

mengejar kesenangan tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesusahan. Yang dikejarinya adalah kesenangan maksimal yang disertai oleh kesusahan minimal. Dan rasio, menurutnya, bertugas untuk menentukan batas ini; dan pengendalian diri diperlukan untuk mencapai cara hidup ideal.<sup>23</sup>

Cabang *kedua* Etika Teleologis adalah Epicureanisme. Menurut Epicurus (314-270 SM), kebahagiaan itu terdapat di dalam nikmat. Yang baik adalah yang menghasilkan nikmat, yang buruk adalah yang menghasilkan perasaan tidak enak. Namun begitu, bagi Epicurus, kenikmatan itu bersifat ruhani dan luhur, dan bukan jasmani sebagaimana tafsiran Aristippos. Bagi Epicurus, hakikat nikmat ada di dalam ketentraman jiwa yg tenang, di dalam *ataraxia* (kebebasan dari rasa risau). Baginya, manusia hendaknya hidup sedemikian rupa sehingga tubuhnya tetap sehat dan jiwanya tenang. Bagi Epicurus, nikmat lebih dilihat secara negatif, yaitu sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan (*apathia*), dan bukan secara positif sebagai perasaan puas. Epicurus sangat menegaskan kebijaksanaan (*phronesis*), dengan pandai mempertimbangkan apakah memilih nikmat atau rasa sakit, dan ia juga menganjurkan untuk selalu menguasai diri. Etikanya bersifat privatis: kebahagiaan pribadi.<sup>24</sup>

Dan cabang *ketiga* Etika Teleologis adalah Utilitarianisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Bentham, manusia berada di bawah kekuasaan dua induk berdaulat, yaitu suka dan duka. Artinya, manusia merupakan organisme suka-duka yang selalu mencari suka dan menghindari duka. Hukum, bagi Bentham, harus diberlakukan jika bisa memaksimalkan suka dan meminimalkan duka bagi orang kebanyakan. Cara kerja Utilitarianisme adalah: daripada bergantung pada pemikiran kabur tentang perasaan atau kesadaran, klasifikasikan dan ukur tiap tindakan dengan mempertimbangkan banyaknya suka dan duka yang dihasilkan. Jika berdasarkan antara banyaknya suka dan duka telah diukur, maka terjadilah "hitungan kebahagiaan", yang oleh Bentham disebut sebagai "Kalkulus Bahagia". Dengan begitu, dicoba untuk memastikan kebahagiaan tersebar seluas mungkin agar menghasilkan apa yang disebutnya sebagai "Kebaikan Umum" atau "Kebahagiaan Terbesar dalam Jumlah Terbesar".<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 113-114.

<sup>24</sup> Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika: sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 49-50.

<sup>25</sup> Dave Robinson dan Chris Garrat, *Mengenal Etika...*, 71.

Bagi kaum Utilitarian, motif itu tidaklah penting. Hanyalah konsekuensi yang patut diperhitungkan. Tekanannya lebih kepada perbuatan daripada pelaku perbuatan. Bentham dan Mill berargumentasi bahwa motif manusia tidak dapat dilihat atau diukur, tetapi konsekuensi perbuatannya bisa dilihat dan diukur. Dalam situasi tertentu, Utilitarianisme memperbolehkan melanggar aturan etis tradisional, jika hal itu menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar daripada kedukaan.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga cabang aliran Etika Teleologis ini bersepakat bahwa suatu perbuatan moral baru benar secara etis, jika membawa kepada kebaikan. Namun begitu, mereka berselisih dalam menafsirkan apa itu yang baik di dalam perbuatan. Bagi Hedonisme, perbuatan yang baik adalah perbuatan yg memberikan kenikmatan jasmani; bagi Epicureanisme, yg memberikan kenikmatan ruhani; dan bagi Utilitarianisme, yang membawa pada kebermanfaatan. Jika Etika Teleologis menekankan pada kebaikan di dalam perbuatan, Etika Deontologis lebih menekankan pada sisi benarnya perbuatan.

Penganut Etika Deontologis adalah Immanuel Kant (1724-1804). Kant memikirkan bahwa klaim etis atas keabsahan universal semestinya berasal dari dalam, dan bukan dicari di luar diri sendiri. Sumber etis terdapat di dalam otonomi dan hukum yang diberikan oleh kehendak sendiri, oleh kebebasan.<sup>27</sup>

Metode Kant di dalam etikanya adalah murni apriori dan murni deduktif, tanpa unsur-unsur pengalaman empiris, karena prinsip-prinsip etis tidak tergantung pada pengalaman sama sekali, dan memiliki asal-usulnya di dalam akal budi. Akal budi adalah kemampuan untuk mengatasi medan indrawi, dan akal budi itu murni jika atau karena bekerja tanpa ditentukan oleh unsur-unsur pengalaman dan faktor-faktor empiris. Akal budi mengenai perbuatan disebutnya akal budi praktis murni. Prinsip-prinsip etis, menurutnya, ditemukan di dalam akal budi yang semacam ini. Akal budi praktis murni (apriori), menurutnya, adalah kemampuan untuk memilih perbuatan tanpa segala penentuan indrawi, misalnya dorongan batin, kebutuhan, nafsu, emosi, perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan; dan ciri khasnya adalah kebebasan.<sup>28</sup>

Akal budi praktis ini, menurut Kant, berbuat secara bebas atau otonom, dalam arti bahwa ia sendiri yang memikirkan hukum-hukum, mengakui hukum-hukum itu sebagai prinsip dan berbuat sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Berbuat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 73.

<sup>27</sup> Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika...*, 140.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 141-142.

sesuai dengan hukum-hukum yang dipikirkan sendiri itu adalah kehendak. Akal budi praktis, karena itu, adalah kemampuan untuk menghendaki. Dan kehendak, menurutnya, tidak menghapus dorongan-dorongan alami, tetapi ia tidak ditentukan olehnya.<sup>29</sup>

Moralitas, menurut Kant, menyangkut hal baik dan buruk. Tetapi, bukan sembarang kebaikan, melainkan apa yang baik *an sich* (pada dirinya sendiri), tanpa pembatasan sama sekali, secara mutlak. Yang baik tanpa pembatasan sama sekali hanyalah satu, yaitu kehendak baik. Jika seseorang berkehendak baik, ia baik, tanpa pembatasan. Kehendak baik itu selalu baik, dan dalam kebaikannya tidak tergantung pada sesuatu di luarnya. Semua hal lainnya yang baik, yang lahiriah, bukan baik *an sich*, melainkan hanya baik jika diabdikan kepada kehendak baik. Kehendaklah yang menentukan apakah watak seseorang digunakan dengan baik atau buruk. Karena itu, tidak ada yang baik *an sich* selain kehendak baik.<sup>30</sup>

Kehendak baik, menurut Kant, adalah kehendak yang mau melakukan kewajiban, berhadapan dengan segala macam dorongan indrawi dan alami. Hanya kehendak yang mau memenuhi kewajibannya demi kewajibannya yang benar secara moral. Melakukan kewajiban karena mau memenuhi kewajiban itulah kehendak yang baik tanpa pembatasan, dan itulah yang disebutnya sebagai moralitas.<sup>31</sup>

Moralitas seseorang, menurut Kant, tidak boleh dilihat pada hasil perbuatannya. Bahwa hasil perbuatan itu baik tidak membuktikan adanya kehendak baik. Ia, dalam hal ini, menolak segala macam etika sukses, atau yang secara teknis disebut Etika Teleologis. Yang membuat perbuatan manusia itu baik secara moral bukanlah hasilnya, bukan juga hasil yang dimaksud, atau yang mau dicapai, oleh si pelaku, tetapi pada kehendak pelaku yang ditentukan semata-mata oleh kenyataan bahwa perbuatan itu merupakan kewajibannya.<sup>32</sup>

Bagi Kant, kewajiban merupakan paham apriori akal budi praktis murni. Apa yang menjadi wajib tidak dapat ditentukan oleh suatu realitas empiris, misalnya suatu kebutuhan, tujuan, nilai, dan sebagainya. Kriteria kewajiban moral, menurutnya, adalah apa yang disebutnya sebagai imperatif kategoris.<sup>33</sup>

Imperatif kategoris itu berbunyi: "Berbuatlah secara moral!" Imperatif kategoris ini, *pertama*, berupa perintah; dan *kedua*, bahwa perintah itu bersifat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 142-143.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 143-144.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 144.

<sup>32</sup> Bandingkan *ibid.*, 144-143.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 145.



kategoris. Sebagai perintah, imperatif kategoris ini bukan sembarang perintah, melainkan suatu keharusan (*Sollen*). Perintah dalam arti ini adalah rasional. Namun, perintah yang dimaksud bukanlah perintah yang ditaati karena paksaan, tetapi perintah yang disadari sebagai keharusan, yaitu keharusan objektif. Di situ bukan paksaan, tetapi pertimbangan yang meyakinkan yang membuat seseorang taat, dan ini tidak berarti mesti diyakini akan kebaikannya.<sup>34</sup>

Telah dijelaskan bahwa bentuk sederhana imperatif kategoris berbunyi: “Berbuatlah secara moral!” Dalam bentuk singkat ini terlihat dengan sangat jelas kekhasan moralitas bahwa ia tidak tergantung pada berbagai maksud baik, tujuan, atau kondisi, melainkan berlaku di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, tanpa perkecualian. Tidak ada situasi dan kondisi di mana seseorang tidak wajib berbuat secara moral.<sup>35</sup>

Kemudian, bagaimana seseorang harus berbuat secara moral? Jawaban atas pertanyaan ini adalah rumusan imperatif kategoris Kant selanjutnya yang berbunyi: “Berbuatlah semata-mata menurut prinsip (*maxime*), yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum!”<sup>36</sup> Rumusan ini mengatakan bahwa seseorang berbuat sesuai dengan kewajiban, jika ia berbuat menurut prinsip-prinsip yang sekaligus dapat dikehendaki berlaku bagi semua orang dan menjadi hukum pada umumnya, dan bagi siapa saja. Imperatif ini disebut juga sebagai prinsip penguniversalisasian.<sup>37</sup>

Dasar yang membuat manusia berbuat sesuai dengan imperatif kategoris adalah otonomi kehendak. Imperatif kategoris adalah paham dan tolok ukur tertinggi segala perbuatan moral, dan otonomi kehendak memungkinkan pememenuhan atas tuntutan-tuntutannya. Otonomi kehendak berarti bahwa kehendak sendirilah yang memberikan hukum. Semua prinsip yang tidak ditetapkan sendiri, tetapi mendahuluinya dan mau menentukannya dari luar, bersifat heteronom (*heteros* = lain, *nomos* = hukum). Di dalam kehendak yang heteronom, kehendak berhadapan dengan hukum yang bukan hukumnya sendiri.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 145-146.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 146-147.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 147. Maksim (*maxime*) adalah prinsip subjektif dalam berbuat, sikap dasar hati seseorang dalam mengambil sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan konkret. Maksim bukan segala macam peraturan atau pertimbangan. Maksim adalah sikap-sikap dasar yang memberikan arah bersama kepada sejumlah maksud dan tindakan konkret. Maksim itulah yang menjadi dasar penilaian moral terhadap orang lain. Etika yang mendasarkan diri pada maksim seseorang jauh lebih tepat daripada etika peraturan atau etika norma-norma yang hanya memperhatikan sesuai atau tidaknya perbuatan seseorang dengan suatu peraturan atau norma. Etika yang berdasarkan maksim memperhatikan sikap hati sumber perbuatan, yang menunjukkan lebih banyak kualitas seseorang daripada kesesuaiannya dengan suatu norma atau peraturan (*Ibid.*).

<sup>37</sup> *Ibid.*, 148.

Dan itu, oleh Kant, ditolak karena bukan merupakan kehendak otonom, dan bertentangan dengan hakikat moralitas.<sup>38</sup>

Kant juga menyatakan bahwa orang yang mau menaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya hanya karena mengharapkan pahala dan surga, atau hanya karena takut pada neraka, tidak bersifat moral, dan karena itu tidak pantas. Sedangkan kebahagiaan tidak mungkin menjadi prinsip moralitas, karena pencapaiannya tergantung pada faktor-faktor empiris.<sup>39</sup>

Semua pertimbangan heteronom dari luar itu, oleh Kant, disebut materi kehendak. Begitu materi menentukan kehendak, kehendak berada di bawah hukum dari luar, dan karena itu terkena heteronomi dan tidak lagi berstatus moral, karena tidak lagi universal dan tidak lagi tidak bersyarat.<sup>40</sup>

Jika semua materi ditolak sebagai unsur penentu kehendak moral, yang tersisa hanya tinggal satu, yaitu formanya atau bentuknya. Kehendak otonom adalah kehendak yang semata-mata ditentukan oleh bentuk prinsip-prinsipnya. Bentuk prinsip tindakan adalah keharusan atau hukum. Dengan kata lain, kehendak otonom hanya mengakui diri berada di bawah keharusan yang berasal dari hukum atau kewajiban yang disadari dan diakuinya sendiri sebagai hukum dan kewajibannya. Apa yang disadari sebagai kewajiban, itulah yang dilakukan kehendak otonom.<sup>41</sup>

Pembuktian kenyataan moralitas, menurut Kant, tidak bersifat teoretis, tetapi praktis. Etika bukan teori abstrak, tetapi refleksi atas suatu pengalaman yang tidak dapat disangkal, yaitu kesadaran moral. Kesadaran moral adalah kesadaran akan adanya kewajiban mutlak. Adanya kewajiban mutlak ini tidak didasarkan pada bukti teoretis, tetapi selalu sudah diketahui dan dirasakan. Kewajiban mutlak ini tidak dapat dideduksikan, dan manusia hanya dapat menunjuk kepadanya. Kesadaran yang semacam itu adalah suatu fakta, tetapi bukan fakta empiris. Fakta empiris dapat dibuktikan lepas dari kesadaran, tetapi kesadaran moralitas hanya ada di dalam kesadaran. Dalam hal ini, Kant berbicara tentang fakta akal budi, yang di dalam bahasa biasa disebut sebagai suara hati atau hati nurani. Hati nurani tidak dapat dibuktikan, tetapi manusia dapat menunjuk kepadanya. Dari situ, Kant kemudian sampai kepada kesadaran akan adanya kemutlakan, adanya kebaikan tanpa batas.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 149-150.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 150.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 152-153.

Jika orang mau menyangkal suara hatinya, ia dapat menyangkalnya, tetapi dengan itu ia telah masuk ke dalam kontradiksi. Ia hanya dapat mengharapkan orang lain untuk mempercayai penyangkalannya jika orang lain mengandaikan bahwa ia tidak akan berbohong, dan hal itu mengandaikan ia sadar bahwa ada kewajiban mutlak untuk tidak berbohong.<sup>43</sup>

Kant menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban mutlak, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Kant mencontohkan tentang seseorang yang diancam akan langsung mendapat hukuman mati, kecuali ia bersedia memberikan kesaksian palsu mengenai orang lain yang tidak bersalah, namun ia tetap menolak untuk memberikan kesaksian palsu. Contoh ini memperlihatkan bahwa manusia mempunyai kesadaran bahwa ia berada di bawah hukum moral.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, kebebasan kehendak merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal karena terimplikasi langsung di dalam kesadaran moral. Kenyataan semacam itu, oleh Kant, disebut sebagai postulat. Postulat adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara teoretis, tetapi yang kenyataannya tidak dapat disangkal juga karena suatu realitas tidak mungkin jika postulat itu tidak nyata-nyata ada. Kenyataan kesadaran moral mengimplikasikan bahwa manusia betul-betul memiliki kebebasan kehendak. Yang dimaksudnya dengan kebebasan kehendak adalah bahwa dengan itu manusia dapat mengambil sikap dan perbuatan lepas dari berbagai macam dorongan, rangsangan, emosi dan sebagainya.<sup>45</sup> Pengertian kebebasan berkehendak di sini berbeda maksudnya dengan apa yang dipahami di dalam aliran teologi dialektis Islam, yang aliran lawannya memahami bahwa di dalam perbuatan manusia terdapat adanya campur tangan Tuhan.

Selain kebebasan, moralitas, menurut Kant, juga mengimplikasikan dua postulat yang lain, yaitu imortalitas jiwa dan eksistensi Tuhan. Dengan kata lain, kenyataan moralitas hanyalah mungkin jika diandaikan bahwa jiwa manusia tidak dapat mati dan jika Tuhan betul-betul ada.<sup>46</sup>

Paparan-paparan di atas telah menjelaskan Etika Teleologis dan Deontologis. Di dalam kedua aliran ini secara jelas telah ditunjukkan bahwa aturan etis pada dasarnya memang menyangkut perbuatan moral dalam kerangka

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 153.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, 154.

baik atau benar, dan analisis etis cenderung dan berpusat pada dua istilah ini. Meskipun ada banyak cara untuk menggunakan kata kunci lain sebagai ukuran etis, cara-cara yang seperti itu, sebenarnya, pada ujungnya hanya akan dapat dikembalikan pada penelusuran terhadap dua ukuran etis, baik atau benar. Di bawah ini akan dijelaskan maksudnya.

Etika Perwujudan Diri. Aliran etika ini diusung oleh Idealisme Amerika, terutama melalui gagasan W. M. Urban. Menurutnya, dalam tulisannya, *Fundamentals of Ethics*, prinsip yang mendasari penilaian etis adalah "perwujudan diri". Ini, menurutnya, bertolak dari kenyataan bahwa manusia sesungguhnya merupakan diri. Tujuan hidup manusia adalah penyempurnaan diri. Dan segi manusia yang paling menonjol adalah keadaannya sebagai diri ruhani. Kebaikan tertinggi adalah perwujudan diri sendiri sebagai diri ruhani. Seseorang harus mewujudkan dirinya di dalam tingkatan spiritual. Apa yg menimbulkan penilaian yang benar bahwa perwujudan diri adalah penilaian etis yang terbaik? Jawabannya, menurut Urban, adalah karena hakikat diri adalah kebaikan. Jika hakikat diri adalah keburukan, maka bagaimana halnya? Perwujudan diri itu adalah kebaikan. Namun demikian, kebaikan itu lain dari perwujudan diri. Berarti, yang baik adalah sesuatu yang jika dipunyai oleh sesuatu objek menjadikan objek tersebut baik, atau sesuatu segi dari objek yang perlu selalu ditambahkan.<sup>47</sup>

Namun begitu, di dalam Etika Barat dikenal juga satu aliran etika yang lain, yaitu Etika Teologis (Etika Ketuhanan). Menurut Etika Teologis, kualitas penentu atau ukuran kebaikan semestinya adalah sesuatu yang abadi, yang mutlak, dan yang merupakan satu-satunya kebaikan yang sejak semula kebaikan sudah terkandung di dalam dirinya. Tuhan merupakan penentu kebaikan, karena Diri-Nya sendiri merupakan kebaikan. Menurut etika ini, di dalam semua teori tentang hakikat tanggapan moral terdapat makna kewajiban dan perintah. Tetapi, dasar semua kewajiban itu tidak selalu jelas.<sup>48</sup> Etika Teologis mempertanyakan: Apakah yang mengharuskan manusia untuk mencari kenikmatan, kebermanfaatan, dan untuk mencapai perwujudan diri? Dapatkah semua itu memerintahkan manusia? Etika Teologis bahkan tidak hanya memberikan kritik kepada Etika Teleologis dan model-model etika lainnya seperti Etika Perwujudan Diri. Etika Deontologis juga menjadi sasaran kritiknya. Apakah yg mengharuskan orang untuk mencari kewajiban. Dapatkah kewajiban memerintahkan manusia?

---

<sup>47</sup> Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 357-360.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 361.

Apakah yang menyebabkan manusia merasa dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik? Baik Hedonisme, Epicureanisme, dan Utilitarianisme dari kubu Etika Teleologis, dan Idealisme Amerika, serta Deontologisme Kant sendiri tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Di sini dikehendaki adanya dasar bagi etika yg di dalamnya sekaligus sudah terkandung sumber kewajiban. Dalam hal ini, pertanyaan yang ingin diajukan adalah dapatkah kebaikan (bahkan ide kewajibannya Kant) memaksa orang secara berwibawa untuk berbuat moral? Yang diperlukan bagi perbuatan yang berwibawa adalah suatu hal atau suatu kekuasaan yang kewibawaannya tidak dapat ditentang. Dan kekuasaan itu sendiri haruslah baik, merupakan sumber kebaikan, dan sekaligus memerintahkan agar manusia berbuat baik, dengan suatu kewibawaan yang tidak akan ditentang oleh mereka yang mengakui kewibawaannya. Kiranya, hanya Tuhan yang memiliki syarat-syarat tersebut, dan berhubung karena Dia merupakan sumber kebaikan yang sebenarnya.<sup>49</sup>

Namun demikian, Etika Teologis pun, yang kiranya dianggap mampu menyelesaikan persoalan di dalam bidang etika, di Barat, tidak luput juga dari kritikan. Pertanyaannya adalah: Apakah yang dimaksudkan bahwa Tuhan *an sich* adalah kebaikan? *Pertama*, apakah karena Tuhan berbuat kebaikan? Atau, *kedua*, apakah karena perbuatan Tuhan *an sich* merupakan kebaikan?<sup>50</sup>

Jika afirmasi diberikan pada pertanyaan *pertama*, bahwa Tuhan itu baik karena Ia berbuat kebaikan, maka, yang dimaksudkan adalah bahwa: Kebaikan itu berbeda dengan perbuatan Tuhan, dan Ia menyesuaikan Diri-Nya dengan kebaikan.<sup>51</sup> Konsekuensi dari ini adalah bahwa: Tuhan berbuat hal yang baik, karena hal itu *an sich* adalah baik.<sup>52</sup> Jika konsekuensi ini diterima, maka Etika Teologis bukan hanya gagal dalam menyediakan dasar yang mutlak, tetapi juga gagal dalam menjelaskan apa hakikat kebaikan; misalnya, tentang ciri-ciri khas yang menyebabkan Tuhan memutuskan untuk memilih dan menganggapnya sebagai perbuatan baik.<sup>53</sup>

Namun, jika afirmasi diberikan pada pertanyaan *kedua*, bahwa Tuhan itu baik, karena perbuatan-Nya *an sich* merupakan kebaikan,<sup>54</sup> maka, yang dimaksudkan adalah bahwa: Perbuatan Tuhan *an sich* itu baik, karena merupakan

---

<sup>49</sup> Bandingkan *ibid.*

<sup>50</sup> Bandingkan *ibid.*

<sup>51</sup> Bandingkan *ibid.*

<sup>52</sup> Bandingkan *ibid.*, 363.

<sup>53</sup> Bandingkan *ibid.*, 363-364.

<sup>54</sup> Bandingkan *ibid.*, 361.

perbuatan Tuhan. Apa saja yang diperbuat dan dikehendaki Tuhan itu senantiasa baik, karena Tuhan-lah yang melakukannya dan menghendakinya.<sup>55</sup> Konsekuensi dari ini adalah bahwa: Perbuatan Tuhan itu baik semata-mata karena Tuhan-lah yang berbuat.<sup>56</sup> Jika konsekuensi ini pun diterima, maka apapun yang buruk dapat menjadi baik jika Tuhan yang berbuat dan menghendakinya. Dan ini tidak dapat diterima. Dengan begitu, Etika Teologis agaknya juga gagal dalam memberikan ukuran terakhir bagi penyelesaian masalah benar-salah, dan juga gagal dalam menyediakan dasar yang gamblang bagi etika.<sup>57</sup>

Dari keterangan di atas, Etika Teologis, tinimbang aliran etika lainnya, dianggap berhasil dalam menetapkan dasar yang jelas bagi perintah dan kewajiban moral. Etika Teologis mendasarkan ukuran etisnya pada Kewibawaan Tuhan, dan menetapkan Tuhan sebagai sumber kebaikan yang sesungguhnya. Namun, ketika kepadanya diajukan pertanyaan kritis: “Apa maknanya bahwa Tuhan itu Maha Baik?”, Etika Teologis telah gagal; baik dalam menjelaskan hakikat kebaikan dan menyediakan dasar yang mutlak; maupun dalam memberikan ukuran terakhir benar-salah dan dalam menyediakan dasar yang gamblang bagi etika.

Etika Teologis sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari Teologi Natural<sup>58</sup> Barat, yang pemikiran-pemikirannya tidak didasarkan pada wahyu, tetapi kepada akal semata. Kegagalan dalam memberikan dasar yang kokoh bagi pemikiran yang didasarkan pada akal semata ini tidak berhenti di sini. Kegagalan filsafat semacam ini juga muncul saat mencoba untuk membangun suatu sistem pemikiran yang koheren.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Bandingkan *ibid.*, 361-362.

<sup>56</sup> Bandingkan *ibid.*, 362.

<sup>57</sup> Bandingkan *ibid.*, 364.

<sup>58</sup> Teologi, sebagai sebuah kajian filsafati tentang Tuhan, merupakan cabang dari metafisika. Namun demikian, apa yang disebut teologi perlu dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, *revealed theology* (teologi kewahyuan) atau teologi yang didasarkan pada wahyu. *Kedua*, *natural theology* atau teologi metafisik. Yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam paparan di atas. Teologi ini saja yang merupakan bagian dari metafisika, mengacu pada spekulasi rasio, bersifat filsafati, dan sebagai kajian objektif.

<sup>59</sup> Di antara syarat yang harus dimiliki oleh pemikiran kefilosofan adalah bahwa sistemnya haruslah bersifat koheren. Perenungan kefilosofan harus menyusun suatu bagan konseptual yang koheren. ‘Koheren’ ialah runtut. Kata ‘runtut’ (*‘consistent’*) dimengerti melalui kebalikannya, yaitu ‘tidak runtut’ (*‘inconsistent’*) atau ‘bertentangan’ (*‘contradictory’*). Suatu pemikiran filsafat tidak boleh mengandung pernyataan-pernyataan bertentangan satu sama lain, karena filsafat berusaha menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan agar dimengerti. Penyelesaian dilakukan dengan menyampaikan pernyataan yang terbukti benar, atau terbukti kebenarannya dibandingkan pernyataan-pernyataan lain. Penyelesaian itu tidak mungkin jika dikatakan bahwa suatu pernyataan benar dan pernyataan yang bertentangan dengannya juga benar. Di dalam suatu pemikiran yang tidak berpegang pada suatu pernyataan tunggal, tidaklah mungkin ada pemikiran yang masuk akal (*Ibid.*, 8-9.).

Lihat, misalnya, ketika Teologi Natural Barat mencoba membangun pernyataan-pernyataan untuk merumuskan doktrin Kebaikan Tuhan seperti di bawah ini:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada.<sup>60</sup>

Sekilas, kedua pernyataan ini tidak mengandung kontradiksi. Tetapi, jika atas pernyataan-pernyataan ini diajukan kenyataan bahwa keburukan itu agaknya merupakan sesuatu yang benar-benar ada, maka pertanyaannya adalah: “Bagaimanakah keburukan dapat terjadi?”<sup>61</sup>

Jika atas “Tuhan adalah Pencipta segala sesuatu yang ada” (pernyataan 2) diajukan anggapan bahwa keburukan itu ada, maka, konsekuensinya adalah “Tuhan adalah Pencipta keburukan”. Dengan demikian, atas dua pernyataan di dalam kajian teologi tersebut, *kesimpulannya* akan berbunyi:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada, termasuk keburukan.<sup>62</sup>

Pernyataan ini ingin mengatakan bahwa karena “Tuhan Maha Kuasa” (kesimpulan 2), maka, apa yang diciptakan Tuhan tentu diciptakan-Nya, termasuk keburukan, karena Ia ingin menciptakannya. Sudah tentu demikian halnya. Di sini, *kontradiksi 1* sudah terlihat. Kemahakuasaan Tuhan (yang Kuasa menciptakan keburukan) berkontradiksi dengan Kemahabaikan-Nya (yang tidak menginginkan keburukan).

Namun demikian, kontradiksi lain akan terlihat juga, jika dilihat dari sisi yang berbeda. Jika *kesimpulannya* dikembalikan lagi, maka:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada, termasuk keburukan.

Pernyataan ini, pada sisi lain, ingin mengatakan bahwa karena “Tuhan Maha Kuasa” (kesimpulan 2), maka, apa yang diciptakan Tuhan tentu diciptakan-Nya, termasuk keburukan, karena Ia ingin menciptakannya. Sudah tentu demikian halnya. Sebab, jika “Tuhan menciptakan keburukan” (kesimpulan 2), meskipun

---

<sup>60</sup> Bandingkan *ibid.*, 10.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Bandingkan *ibid.*

“Tuhan tidak ingin melakukan keburukan”, karena “Ia Maha Baik” (kesimpulan 1), berarti Tuhan *terpaksa* berbuat berlawanan dengan Kehendak-Nya; dan ini tidak mungkin karena “Tuhan Maha Kuasa”<sup>63</sup> (kesimpulan 2). Dalam hal inilah *kontradiksi 2* terlihat. “Tuhan Maha Kuasa” (kesimpulan 2) berkontradiksi dengan “Tuhan *terpaksa* berbuat buruk (di sini, Kemahaberkehendakan Tuhan patut dipertanyakan), meskipun Tuhan tidak ingin melakukan keburukan, karena “Tuhan Maha Baik” (kesimpulan 1). Tegasnya, supaya bersesuaian dengan Kemahabaikan Tuhan, yang tidak menginginkan keburukan (kesimpulan 1), Kemahakuasaan-Nya berkontradiksi dengan Kemahaberkehendakan-Nya.

Namun demikian, sebenarnya, kontradiksi sudah mulai terlihat sejak awal. Mari lihat lagi:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada.

Di sini, kontradiksi belum kelihatan. Tetapi, ketika dinyatakan bahwa keburukan itu sungguh benar-benar ada, maka pernyataan-pernyataan tersebut *kesimpulannya* akan berbunyi:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada, termasuk keburukan.

Dari sini, *kontradiksi 3* terlihat. “Tuhan Maha Baik” (kesimpulan 1) tentulah berkontradiksi dengan “Tuhan Pencipta segala sesuatu yang ada, termasuk keburukan.” (kesimpulan 2). Di sini, sifat Kemahabaikan Tuhan dipertanyakan. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Ia menciptakan keburukan? Tegasnya, di sini, Kemahabaikan Tuhan berkontradiksi dengan keburukan yang Ia ciptakan.

Dari paparan di atas, dari pernyataan yang sepiintas tidak terlihat kontradiksinya:

1. Tuhan Maha Baik, dan tidak menginginkan keburukan.
2. Tuhan Maha Kuasa, dan Pencipta segala sesuatu yang ada.

mulai menimbulkan masalah ketika diutarakan pernyataan kritis; dalam hal ini, bahwa keburukan itu tampaknya benar-benar ada; dan kontradiksi mulai terlihat. Dari paparan di atas, dua pernyataan tersebut melahirkan tiga kontradiksi, saat pernyataan kritis diajukan berkenaan dengan keniscayaan tentang adanya keburukan. Kontradiksi *pertama*, Kemahakuasaan Tuhan (yang Kuasa

---

<sup>63</sup> Bandingkan *ibid.*



menciptakan keburukan) berkontradiksi dengan Kemahabaikan-Nya (yang tidak menginginkan keburukan). Kontradiksi *kedua*, Kemahakuasaan-Nya berkontradiksi dengan Kemahaberkehendakan-Nya. Dan kontradiksi *ketiga*, Kemahabaikan Tuhan berkontradiksi dengan keburukan yang Ia ciptakan.

Dari paparan-paparan di atas dapatlah diketahui bahwa pemikiran dengan menggunakan akal saja telah gagal dalam membangun basis filsafati yang kokoh bagi etika (baca juga: ilmu akhlak) yang mapan. Ini dapat diklasifikasikan dalam dua hal, jika klasifikasi ini menggunakan model etika teologis dan etika non-teologis. Pada satu sisi, semua model etika non-teologis tidak dapat menentukan dasar yang sungguh eksistensial atas perintah dan kewajiban perbuatan moral; baik itu Etika Deontologis, yang mengukur perbuatan moral pada kriteria benar-salah, maupun Etika Teleologis, yang mengukurnya dengan kriteria baik-buruk. Pada sisi lain, Etika Teologis memang berhasil menunjukkan bahwa dasar yang sungguh eksistensial atas perintah dan kewajiban perbuatan moral hanyalah Tuhan. Namun, di dalam etika ini beberapa kegagalan juga ditemukan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, kegagalan yang dimaksud adalah: *pertama*, berkenaan dengan usaha pendasaran Tuhan – tegasnya, Kewibawaan Tuhan yang memerintah dan mewajibkan – sebagai ukuran etis. Usaha ini tidak berhasil karena tidak mampu menjawab apa makna Kebaikan Tuhan; *kedua*, tentang usaha membangun logika mengenai Kebaikan Tuhan di dalam sistem pemikiran filsafati yang koheren. Namun demikian, tampaknya, di sini ada lagi kegagalan yang dapat muncul, bahkan jika dua kegalan sebelumnya tidak ditemukan. Kegagalan yang *ketiga*, yaitu bahwa etika yang semacam ini – yang hanya mengandalkan akal semata – hanya berlaku bagi paham yang mengakui keberadaan Tuhan dan beriman kepada-Nya (theisme), namun, tidak berlaku bagi yang mengingkari keberadaan-Nya (atheisme), serta yang menanggukuhkan keputusan tentang ada atau tidak adanya Dirinya (agnostisme).

Berpikir dengan cara rasional dan logis di dalam mendekati problem-problem memang merupakan cara kerja filsafat – dan etika termasuk bagiannya. Justru karena pendekatan yang seperti itu berfilsafat bersifat rasional dan dapat dikontrol oleh siapa saja yang mau menggunakan akalanya.<sup>64</sup> Namun, norma yang diajukan di dalam Etika Teologis tentu saja tidak mempan bagi orang berakal yang meragukan atau bahkan yang mengingkari keberadaan Tuhan. Untuk apa orang

---

<sup>64</sup> Bandingkan K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 22.

mematuhi perintah dan kewajiban-Nya, jika Kewibawaan-Nya tidak tersentuh oleh kesadarannya?

Terakhir, kegagalan Etika Teologis yang *keempat*, adalah berkenaan dengan kemampuan di dalam menentukan kriteria etis perbuatan moral manusia, di dalam sistemnya sendiri, persis seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Karena hanya menyandarkan pemikiran etis perbuatan pada akal semata – bahkan sekali lagi jika dua kegalan pertama yang tersebut di atas tidak ditemukan –, atas dasar apa etika yang semacam ini dapat memberitahukan jenis-jenis perbuatan mana yang moral dan imoral, persis seperti yang disetujui oleh Tuhan sendiri?

Di sinilah, karena hanya mengandalkan akal semata, Etika Teologis gagal dalam mengungkapkan penerapan aturan-aturan etis tertentu di dalam sistemnya sendiri.<sup>65</sup> Jika etika ini bersifat teologis (ketuhanan), semestinya ia mampu menunjukkan aturan-aturan yang semacam itu, persis seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.

Etika Teologis barangkali memang benar ketika menyatakan bahwa ukuran perbuatan etis yang tepat tidak ditentukan oleh benar-salahnya suatu perbuatan (Etika Deontologis), dan tidak juga oleh baik-burunya perbuatan tersebut (Etika Teleologis), tetapi oleh suatu otoritas yang berwibawa, yaitu Tuhan. Kedua macam etika tersebut tidak mampu menjawab apa dasar dari perintah dan kewajiban yang menuntut manusia untuk berbuat yang tepat secara etis. Etika Teologis menghendaki perlu adanya suatu dasar bagi etika atau – lebih tepatnya – otoritas, yang di dalamnya sekaligus sudah terkandung sumber kewibawaan. Otoritas berwibawa yang menuntut manusia untuk berbuat moral yang tepat secara etis ini, menurut Etika Teologis, sekali lagi, adalah Tuhan.

---

<sup>65</sup> Menurut Yazdi, proposisi-proposisi etika, dan juga hukum, dapat diungkapkan dalam dua pola. *Pertama*, dengan menerangkan kehakikian dan perkaranya sendiri, atau apa yang dikenal sebagai prinsip-prinsip universal, di dalam etika dan hukum. Contoh, proposisi di dalam etika yang berbunyi “Keadilan adalah kebaikan”, “Seseorang tidak boleh berbuat zalim kepada sesamanya”, dan seterusnya. *Kedua*, dengan mengungkapkan penerapan aturan-aturan tertentu dalam suatu sistem. Misalnya, menurutnya, perkataan “Berbohong untuk mendamaikan diperbolehkan di dalam Islam”. Jika seorang pakar fikih atau hakim hendak menjelaskan hukum-hukum serupa itu, ia tidak harus menjabarkan sistem etika dan hukum Islam secara keseluruhan. Karenanya, ungkapan “menurut Islam” pada umumnya tidak diperlukan (Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Badung: Mizan, 2003), 154.

Catatan kaki ini ingin menunjukkan, terutama melalui poin kedua di atas, bahwa Etika Teologis, di dalam sistemnya sendiri, tidak mampu menunjukkan aturan-aturan etis tertentu sebagai aturan-aturan etis yang berasal dari Tuhan sendiri. Jika etika ini bersifat teologis, maka aturan-aturan etisnya semestinya merupakan aturan-aturan yang seperti itu persis seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.

Terakhir, catatan kaki ini juga ingin menunjukkan pola atau klasifikasi lain yang dapat digunakan untuk memetakan aliran-aliran di dalam etika. Jika menggunakan klasifikasi Yazdi di atas, etika Kant dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertama, karena titik tekan etikanya pada prinsip-prinsip universal etika di dalam perbuatan. Sedangkan semua etika teleologis dan Etika Perwujudan Diri, barangkali, dapat dimasukkan pada kelompok kedua.

Namun, pertanyaan apa kriteria etis dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, tidak dapat dijawab oleh etika ini di dalam sistemnya sendiri.

Ini tentu saja wajar karena Etika Teologis tidak memiliki persambungan doktrin dan ajaran yang langsung berasal dari Tuhan. Di sinilah diketahui bahwa akal telah gagal dalam merumuskan etika yang tepat, dan manusia perlu meminta bantuan kepada sumber lain di luar akal, yaitu Wahyu, yang merupakan wadah-Nya dalam menyampaikan Titah-Nya kepada manusia. Dengan kata lain, pada titik ini, akal menemui jalan buntu, dan disadari betapa perlunya agama yang telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang beriman. Dari sinilah dimulai perlu adanya suatu etika yang didasarkan atas ajaran-ajaran agama tertentu, atau yang di sini disebut sebagai *Religious Ethics*; atau *Scriptural Ethics*, karena hubungannya dengan Kitab Suci. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada etika yang semacam ini di dalam Islam.

Di dalam Etika Religius dikehendaki bahwa kriteria kebenaran dan kesalahan di dalam proposisi-proposisi etis ditentukan oleh kesesuaian atau ketidakesesuaiannya dengan rujukan dan sumber etika yang dimaksud. Dan cara mengetahuinya tidak lain adalah dengan merujuk langsung kepada sumber-sumber yang terkait dengan sistem yang bersangkutan. Misalnya, cara mengetahui benar-salahnya kaidah-kaidah Etika Islam ialah dengan merujuk langsung kepada Alquran dan Sunnah.<sup>66</sup>

Islam memandang Alquran dan Sunnah sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), pandangan hidup (*al-nazar il al-hayat, world view, Weltanschauung*), dan sumber kebenaran yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik. Tidak seorang pun diakui sebagai muslim, setidaknya secara minimalis, kecuali mengakui doktrin ini. Namun demikian, Alquran juga menyatakan bahwa manusia juga perlu menggunakan akalannya bagi mereka yang mau berpikir. Di dalam Islam, persoalan etika memang diselesaikan tidak hanya dengan penggunaan akal semata, tetapi juga disangkutkkan pada hubungannya dengan sumber kewahyuan Islam sendiri. Sumber-sumber akal dan wahyu diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan sistem etika yang padu.

Melanjutkan maksud Etika Teologis dan penekanannya pada Etika Islam, pembahasan selanjutnya menegaskan bahwa ukuran etis yang tepat adalah Otoritas Allah. Kewibawaan-Nya menuntut manusia untuk melakukan perbuatan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

yang tepat sesuai dengan Perintah-Nya, persis seperti apa yang dimaksudkan-Nya sendiri, dan Wahyu Islam adalah sumbernya.

Di dalam Islam, sebagian besar kontroversi bidang etika bersumber dari perdebatan-perdebatan teologis yang paling pokok.<sup>67</sup> Dan salah satunya terjadi antara Asy'ariyyah dan Mu'tazilah menyangkut makna soal-soal etika.<sup>68</sup> Namun, persoalan ini diawali dengan perselisihan mengenai masalah akal dan wahyu. Yang dipermasalahkan adalah sejauh mana kesanggupan akal dan fungsi wahyu terhadap dua persoalan dalam agama, yaitu tentang Tuhan, dan tentang kebaikan dan keburukan. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 1. Dapatkah akal mengetahui adanya Tuhan? 2. Jika ya, dapatkah akal mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan? 3. Dapatkah akal mengetahui yang baik dan yang buruk? 4. Jika ya, dapatkah akal mengetahui bahwa wajib bagi manusia berbuat baik dan wajib baginya menjauhi perbuatan buruk?<sup>69</sup>

Bagi kaum Mu'tazilah, keempat persoalan tersebut dapat diketahui dengan akal. Semua pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan begitu, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu itu wajib. Baik dan buruk adalah sifat esensial bagi kebaikan dan keburukan. Dan kebaikan dan keburukan wajib diketahui melalui akal, dan demikian juga mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk.<sup>70</sup>

Jika kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa keempat persoalan tersebut dapat diketahui melalui akal, golongan Asy'ariyyah menyatakan bahwa akal hanya dapat mengetahui satu di antaranya, yaitu adanya Tuhan. Menurut al-Asy'ari, semua kewajiban hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tidak dapat menentukan sesuatu sebagai wajib, dan dengan demikian tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk adalah wajib. Ia mengatakan bahwa akal hanya dapat mengetahui adanya Tuhan, tetapi mengetahui tentang kewajiban terhadap Tuhan hanya diperoleh melalui wahyu.<sup>71</sup> Dari uraian ini diketahui bahwa di antara kedua aliran teologi dialektis di atas terdapat perbedaan besar mengenai kemampuan akal. Jika dirinci dengan nilai angka, kemampuan akal manusia, bagi aliran yang pertama nilainya 4, dan bagi

---

<sup>67</sup> Lihat pendapat M. Fakhry ini dalam Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002), 127.

<sup>68</sup> Lihat pendapat George F. Hourani ini dalam *ibid.*

<sup>69</sup> Bandingkan Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI-Press, 1986), 75-76.

<sup>70</sup> Bandingkan *ibid.*, 76.

<sup>71</sup> Bandingkan *ibid.*

aliran yang kedua nilainya 1. Dengan demikian, kemampuan akal manusia bagi kaum Mu'tazilah itu kuat, sedangkan bagi Asy'ariyyah lemah.<sup>72</sup> Dengan ini dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah lebih rasional daripada Asy'ariyyah.

Sesuai dengan pembahasan ini dari empat pertanyaan di atas yang perlu ditekankan adalah pertanyaan ketiga. Dapatkah akal mengetahui yang baik dan yang buruk?

Adagium terkenal dari Mu'tazilah mengenai persoalan ini berbunyi: "kebaikan dan keburukan bersifat rasional dan intrinsik (*al-husn wa al-qubh al-'aqliyyan al-dzatiyyan*). Sementara antitesisnya, Asy'ariyyah, mengambil posisi tradisionalistik dengan menyatakan bahwa yang baik dan yang buruk ditetapkan oleh doktrin keagamaan dan tidak mesti rasional.<sup>73</sup>

Mu'tazilah sebenarnya ingin mengatakan bahwa sumber asal nilai etis itu berasal dari prinsip-prinsip universal etika, dan sebaliknya Asy'ariyyah ingin mengatakan bahwa itu berasal dari aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri di dalam sistem-Nya (baca: Wahyu-Nya).<sup>74</sup> Dengan kata lain, Mu'tazilah mendukung pandangan objektivitas etika, dan sebaliknya, Asy'ariyyah mendukung pandangan subjektivitas etika.<sup>75</sup>

Bagi Asy'ariyyah, nilai etis itu murni bersifat subjektif. Maksudnya, bisa bermakna dengan adanya subjek, yang dalam hal ini adalah Allah. Satu-satunya tujuan berbuat moral adalah mematuhi Allah. Tujuan berbuat moral yang lain – yang muncul sebagai alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat, yang mungkin dapat juga menjadi faktor – tidak sejati sifatnya, dan bukan merupakan *raison d'être* manusia di dalam berbuat moral.<sup>76</sup>

Bagi Asy'ariyyah, jika perbuatan moral dijalankan menyimpang dari keinginan Allah, itu berarti imoral. Soalnya, yang dimaksud dengan moralitas

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 75-76.

<sup>73</sup> Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2005), 193.

<sup>74</sup> Lihat lagi catatan kali nomor 65.

<sup>75</sup> Mengenai kedua istilah ini, objektivitas etika dan subjektivitas etika, penjelasan Lorens Bagus dapat menjadi gambaran. Menurutnya, perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip etika, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme etis atau subjektivisme etis (Bandingkan Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 218.). Penggunaan kedua istilah ini agak disetujui oleh Oliver Leaman. Pasalnya, pada poin tentang subjektivisme etis, Leaman tidak memaknai subjeknya sebagai manusia, tetapi Allah. Menurut Leaman, makna etika murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku di dalam Etika Keagamaan, menegaskan bahwa satu-satunya tujuan di dalam bertindak moral adalah mematuhi Allah (Lihat dan bandingkan Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam*, 127). Dan lihat penggunaan Leaman sendiri atas kedua istilah ini dalam *ibid.*, 127-139.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 127.

adalah bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, sebagai lawan imoralitas, yang berarti larangan-larangan Allah. Jika kaidah ini tidak dimengerti, manusia tidak mempunyai peluang berbuat dengan motif yang benar, yang sangat penting bagi watak kebajikan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan motif yang keliru tidaklah pantas. Sebaliknya, perbuatan salah yang dilakukan dengan motif yang benar bisa dimaafkan.<sup>77</sup>

Sebaliknya, Mu'tazilah mengambil pendekatan yang berbeda. Menurut mereka, semua perintah Allah itu benar adanya, dan sifat Benar-nya terpisah dari Perintah-Nya. Dia memerintahkan manusia untuk berbuat sesuatu yang benar, karena perbuatan itu *an sich* memang perbuatan yang benar, berdasarkan landasan-landasan objektif, dengan kata lain sesuai dengan prinsip-prinsip universal etika, dan bukan terutama karena itu merupakan Perintah-Nya. Dia tidak bisa menuntut manusia berbuat sesuatu yang tidak benar, karena aturan-aturan etis bukanlah hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya. Memang, menurut Mu'tazilah, Allah lebih tahu perbuatan mana yang harus dilakukan oleh manusia, dan manusia harus terus mencari Bimbingan-Nya. Hanya saja, yang lebih Dia ketahui tinimbang kita hanyalah menyangkut jalan menuju kebajikan, yang disebut *syari'ah*. Dia tidak mengetahui kebajikan dalam arti menciptakannya. Oleh karena itu, peran agama adalah menuntun manusia untuk berbuat sepatutnya. Agama berperan menyediakan tata aturan dan menunjukkan bagaimana seharusnya manusia memikirkan tugas-tugasnya, namun agama tidak menentukan hakikat tugas manusia. Hakikat tugas manusia ditentukan oleh moralitas itu sendiri.<sup>78</sup>

Sebutlah, misalnya, keadaan seorang saleh yang menderita selama di dunia ini. Apa yang akan menyimpannya setelah mati? Bagi Mu'tazilah, Allah harus memberinya pahala atas semua perbuatan baiknya. Karena, jika Dia tidak membalasnya dengan pahala, berarti Dia telah berbuat lalim. Dia tidak mempunyai pilihan lain, selain menggajarnya kelak di hari akhir atas semua hal yang dialaminya di dunia. Hal sebaliknya berlaku bagi orang jahat. Dengan begitu, Dia terpaksa berbuat dengan aturan tertentu. Karena, jika Dia bersifat adil – dan Dia *an sich* bersifat adil –, Dia harus mengikuti tata aturan keadilan.<sup>79</sup>

Namun demikian, menurut Asy'ariyyah, Allah mampu melakukan apa saja yang Dia sukai. Bisa saja Dia menyiksa orang yang tidak berdosa, dan memberi pahala kepada orang yang berdosa. Bukankah ini berarti bahwa Dia

---

<sup>77</sup> Lihat pendapat D. Frank ini dalam *ibid.*, 127-128.

<sup>78</sup> Bandingkan *ibid.*, 128.

<sup>79</sup> *Ibid.*

laim? Jawab mereka, tidak. Karena, semua Perbuatan-Nya pastilah keadilan *an sich*. Makna keadilan adalah perbuatan yang dilakukan oleh-Nya.<sup>80</sup> Lebih jauh, Asy'ariyyah mengklaim bahwa Dia-lah yang menentukan makna keadilan. Dan, begitulah semestinya jika Dia betul-betul Maha Kuasa. Dia tidak hanya berkuasa atas segala sesuatu, karena semuanya adalah ciptaan-Nya dan milik-Nya, tetapi juga harus berkuasa menentukan semua makna.<sup>81</sup>

Dari perdebatan di antara kedua aliran *Ilm al-Kalam* ini, terlihat jelas bahwa kaum Mu'tazilah lebih menekankan sifat Kemahaadilan Allah, dan Asya'ariyyah pada Kemahakuasaan-Nya. Perbedaan pendapat ini pun meluas hingga ke perdebatan tentang kebebasan manusia *vis a vis* Kekuasaan Mutlak-Nya. Jika Mu'tazilah percaya pada kehendak bebas manusia, Asy'ariyyah menolak doktrin ini dan percaya bahwa manusia sepenuhnya terikat pada Takdir-Nya yang predeterministik. Manusia, bagi Asy'ariyyah, sama sekali tidak memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat.<sup>82</sup>

Dari perdebatan kedua aliran Teologi Islam ini, sebenarnya juga terdapat usaha pendasaran aturan etis bahwa ukuran yang tepat bagi perbuatan moral bukanlah terutama pada benar atau baiknya suatu perbuatan. Meskipun dengan sedikit perkecualian, ukuran perbuatan moral adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar, yang dengan kedua sifatnya itu Dia sendiri yang menentukan baik-buruk dan benar-salahnya perbuatan. Etika Islam, dengan ini, dapat diklasifikasikan pada kategori *theistic subjectivism*.<sup>83</sup>

Baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyyah, keduanya mengafirmasikan Kemahabaikan Allah. Hanya saja, kelompok pertama mengharuskan-Nya untuk berlaku baik melalui Keadilan-Nya, kelompok kedua menetapkan Kemahabaikan-

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>82</sup> Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, 194.

<sup>83</sup> Klasifikasi dan kategori etika Islam dengan nama seperti di atas adalah rumusan George F. Hourani (Lihat Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.).

Mengenai pengertian *theistic subjectivism ethics* atau etika subjektivisme ketuhanan ini, berikut penjelasannya. Menurut Lorens Bagus, perbuatan baik maupun perbuatan benar dapat dilihat sebagai objektif, jika dilihat di dalam perbuatan itu sendiri sebagai mengandung prinsip-prinsip etika, menggantikan faktor-faktor real lainnya di luar perbuatan itu sendiri. Dan dapat dilihat sebagai subjektif, jika hanya mewakili proposal manusia. Dari sini, dua kecenderungan harus dibedakan: objektivisme etis atau subjektivisme etis (Bandingkan Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 218.). Penggunaan kedua istilah ini agak disetujui oleh Oliver Leaman. Pasalnya, pada poin tentang subjektivisme etis, Leaman tidak memaknai subjeknya sebagai manusia, tetapi Allah. Menurut Leaman, makna etika murni bersifat subjektif, dalam arti bermakna dengan adanya subjek, jika penekanannya ditujukan pada subjek ini. Dan subjek yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah. Etika yang seperti ini, dan ini berlaku di dalam Etika Keagamaan, menegaskan bahwa satu-satunya tujuan di dalam bertindak moral adalah mematuhi Allah (Lihat dan bandingkan Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam...*, 127). Pengertian *theistic subjectivism ethics* atau etika subjektivisme ketuhanan ini persis seperti yang dimaksudkan oleh Leaman.

Nya di dalam Kemahakuasaan-Nya. Di dalam Islam, Kebaikan-Nya tidak pernah diragukan. Berbeda dengan pemikiran yang mengandalkan akal semata, di dalam Islam, yang *nota bene* pemikirannya dihubungkan juga dengan wahyu, Tuhan adalah Kebaikan Mutlak yang Kebaikan-Nya tidak diragukan. Berikut ini, doktrin tentang Kebaikan Tuhan dijabarkan melalui salah seorang tokoh filsuf Islam, al-Farabi.

Abu Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalagh, yang lahir di Farab, dan dikenal dengan nama al-Farabi (257 H/ 870 M-339 H/950 M), misalnya, dalam membangun klasifikasi ilmunya atas dasar etis – berarti, susunan peringkat ilmu menurut derajat manfaat, dalam hubungannya dengan beberapa tujuan final<sup>84</sup> – menyatakan bahwa tujuan puncak keberadaan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan tertinggi (*al-sa'adah al-quswa*). Kebahagiaan tertinggi disamakannya dengan kebaikan mutlak (*al-khair 'ala al-ithlaq*).<sup>85</sup>

Kebajikan mutlak itu didefinisikan sebagai:

“yang dipilih dan didambakan demi dirinya sendiri, dan dipilih bukan demi sesuatu yang lain. Semua yang lain dipilih demi manfaatnya dalam mencapai kebahagiaan.”<sup>86</sup>

Bagi al-Farabi, kebaikan mutlak adalah Tuhan, Sebab Pertama, karena Dia adalah “tujuan yang selain-Nya tidak ada lagi tujuan lain yang dicari dengan (pertolongan) kebahagiaan”. Apa yang dimaksudkannya adalah bahwa di dalam kesempurnaan akhir di hari akhir, manusia dapat melihat Tuhan, yang merupakan kebahagiaan abadinya.<sup>87</sup>

Namun, al-Farabi menjelaskan bahwa kebahagiaan tertinggi di dalam kehidupan di hari akhir ini mensyaratkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia (*al-sa'adah al-dunya*), yang disebutnya sebagai ‘kesempurnaan pertama manusia’. Dalam pandangannya, jiwa manusia itu tidaklah mati. Tingkat kebahagiaan dalam kehidupan di hari akhir adalah konsekuensi dari tingkat “kesehatan” dalam kehidupan di dunia. Yang dimaksudkannya dengan “kesehatan jiwa” adalah keadaannya dan keadaan bagian-bagiannya yang selalu digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mulia, dan tindakan-tindakan adil. Demikian pula, penderitaan jiwa dalam kehidupan di hari akhir adalah akibat dari

---

<sup>84</sup> Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi*, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), 128.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 128-129.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>87</sup> *Ibid.*



keadaan sakit dalam kehidupan di dunia ini. Yang dimaksudkannya dengan “jiwa yang sakit” adalah keadaannya dan keadaan bagian-bagiannya yang selalu digunakannya untuk melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk, serta tindakan-tindakan jelek. Jika manusia ingin mencapai kebahagiaan duniawi atau kesempurnaan pertama, dan juga kebahagiaan tertinggi, yaitu melihat Tuhan, maka, syaratnya adalah dengan menjaga setiap bagian jiwanya agar tetap dalam keadaan sehat sempurna. Dengan kata lain, manusia harus selalu menjalankan setiap kebajikan dan selalu bersih dari kejahatan.<sup>88</sup>

Al-Farabi telah mendefinisikan kebajikan sebagai keadaan jiwa yang digunakan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perlu dijelaskan apa yang dimaksudkannya dengan ‘kebaikan’. Menurutnyanya:

“Kebaikan itu ada dua macam: (a) tidak ada kejahatan sama sekali merupakan kebalikannya, dan (b) kejahatan-kejahatan merupakan kebalikannya.”<sup>89</sup>

Jenis *pertama* dari kebaikan mengacu kepada Tuhan semata-mata yang merupakan Kebaikan Tertinggi. Tuhan hakikatnya merupakan sumber tertinggi dari setiap yang baik. Dan jenis *kedua* dari kebaikan, yaitu yang relatif, berlaku baik pada tatanan makhluk (ciptaan), maupun pada tatanan moral. Dunia – tatanan makhluk – adalah baik sejauh ia mewujudkan Kebaikan Tertinggi, dan jahat sejauh mengimplikasikan keterpisahan atau jarak dari Sumbernya. Hal ini karena dunia mempunyai kemungkinan menempatkan dirinya ‘berhadapan’ dengan Tuhan, atau sebagai – seakan-akan sama dengan – Tuhan.<sup>90</sup> Karenanya, dunia adalah jahat sejauh ia memungkinkan dirinya jatuh ke dalam kemungkinan politeisme (syirik), agnostisme, dan ateisme, atau keyakinan apa saja yang menjauhkan manusia dari Tuhan.<sup>91</sup>

Sedangkan dalam bidang kehidupan manusia, kebaikan mengacu pada sesuatu yang membawa partisipasi dalam Kebaikan Tertinggi. Kebaikan moral dilambangkan dan diaktualisasikan dengan ketaatan kepada Hukum Tuhan. Lawannya, yaitu kejahatan moral, adalah akibat penyalahgunaan kehendak manusia dan pelanggaran terhadap Hukum Tuhan. Ketidaktaatan kepada Hukum

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, 131.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Bandingkan *ibid.*

Tuhan adalah kejahatan, karena Tuhan telah menetapkan hukum sesuai dengan sifatnya, Yang Maha Baik dan Maha Sempurna.<sup>92</sup>

Dari paparan singkat tentang basis etis dan teorinya tentang kebajikan di atas, al-Farabi telah menyatakan bahwa Tuhan adalah Kebaikan Mutlak. Baginya, kebahagiaan duniawi bukanlah tujuan utama manusia. Tujuan puncak keberadaan manusia, menurutnya, adalah untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu melihat Tuhan. Namun, untuk mencapai kedua macam kebahagiaan ini, manusia harus selalu menjalankan setiap kebajikan dan selalu bersih dari kejahatan. Al-Farabi mendefinisikan kebaikan dalam dua taraf. Pada taraf *pertama* – sebut saja sebagai taraf vertikal –, dunia, sebagai tatanan makhluk, dan manusia termasuk di dalamnya, dikatakan baik jika ia mewujudkan diri di dalam keimanan kepada Tuhan, Sang Kebaikan Tertinggi; dan jahat jika mewujudkan keyakinan yang bermusuhan dengan Eksistensi Tuhan. Pada taraf ini, politeisme (*syirk*), agnostisme, dan ateisme adalah kejahatan. Dan pada taraf *kedua* – sebut saja sebagai taraf horizontal –, yaitu dalam bidang kehidupan manusia, kebaikan mengacu kepada kebaikan moral yang diaktualisasikan dengan ketaatan kepada hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap Hukum Tuhan adalah kejahatan, karena hukum-Nya telah ditetapkan-Nya sesuai dengan sifatnya Yang Maha Baik.

### **Rumusan Etika Islam Sintesis-Multidisipliner**

Dari paparan di atas diketahui bahwa di dalam Islam, ukuran perbuatan moral tidaklah ditentukan oleh baik-buruk atau benar-salahnya perbuatan tersebut, melainkan terutama ditentukan oleh Allah Yang Maha Baik dan Maha Benar. Melalui Etika Teologis usungan Teologi Natural Barat Sekular, diketahuilah bahwa semua aliran etika, baik yang mendasarkan ukuran moralnya pada kerangka baik maupun pada kerangka benar tidak mampu menjawab dengan jelas dasar eksistensial yang memerintah dan mewajibkan manusia untuk berbuat moral. Etika Teologis menghendaki perlu adanya sumber kewibawaan, yang dia sendiri haruslah baik, dan merupakan sumber kebaikan. Otoritas berwibawa ini hanyalah Tuhan.

Namun demikian, aliran etika ini gagal dalam memberikan dasar yang kokoh bagi landasan filsafatnya. Filsafat Barat mempertanyakan doktrin tentang kebaikan Tuhan, dan Etika Teologis tidak mampu mempertahankannya. Kegagalan ini, di antaranya, adalah karena ketidaklengkapan syarat dan muatan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

yang semestinya sudah terkandung di dalam sistemnya sendiri. Jika Etika Teologis adalah etika ketuhanan, semestinya ia mampu menunjukkan kriteria-kriteria apa yang merupakan perbuatan-perbuatan moral, persis seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Ini wajar karena Etika Teologis tidak memiliki persambungan langsung dengan doktrin Tuhan, dan itulah yang terjadi bagi aliran etika apapun yang hanya mengandalkan penggunaan akal semata di dalam merumuskan pemikirannya. Dalam hal ini, Etika Teologis tidak ada bedanya dengan model-model etika sekular lainnya. Dan dari sinilah disadari perlunya penggunaan wahyu, dan orang berhajat pada Etika Keagamaan.

Di dalam Etika Islam, melalui Asy'ariyyah dimengerti bahwa makna etika itu murni bersifat ketuhanan. Satu-satunya tujuan manusia di dalam berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Alasan-alasan praktis yang baik untuk bermoral, seperti untuk mencari kebahagiaan, termasuk kebahagiaan di hari akhir tidaklah sejati sifatnya. Al-Farabi memang telah berhasil menguatkan doktrin tentang kebaikan Tuhan, tetapi etikanya adalah etika yang mencari kebahagiaan. Melalui Kant dimengerti bahwa ketaatan kepada Allah yang tidak dicari sumbernya di dalam diri sendiri melalui kehendak otonom, meskipun berasal dari alasan-alasan praktis yang baik untuk berbuat moral, adalah heteronom sifatnya, tidak bersifat moral, dan karena itu tidak pantas. Namun demikian, melalui al-Farabi dimengerti bahwa kebaikan itu bukan hanya mengacu kepada kebaikan moral, tetapi terutama juga harus mengacu kepada keimanan kepada Allah. Al-Farabi menegaskan bahwa kekufuran kepada (baca: penyangkalan akan eksistensi) Allah juga merupakan keburukan.

Asy'ariyyah memang benar ketika menyatakan bahwa satu-satunya tujuan manusia berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Namun demikian – ini yang agaknya kurang rasional –, kepatuhan manusia kepada-Nya ini terserah Dia kelak apakah akan diganjar-Nya dengan pahala dan surga, atau malah siksa dan neraka. Allah, menurut mereka, Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia sukai; bukan hanya kepada semua ciptaan-Nya, bukan hanya dalam hal menentukan makna keadilan, tetapi bahkan juga untuk menentukan semua makna. Perbuatan buruk, jika itu adalah perintah-Nya, maka itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan baik, jika itu adalah larangan-Nya, maka itu adalah perbuatan yang buruk. Penekanan mereka yang berlebihan pada sifat Kuasa Allah telah mematikan sifat Keadilan-Nya. Memang, bagi mereka, makna keadilan adalah tindakan apapun yang dilakukan oleh-Nya. Namun, konsep keadilan yang seperti ini bukanlah makna keadilan yang sesungguhnya, kecuali dimengerti

melalui sistem pemerintahan kerajaan tradisional kuna, di mana hukum dan undang-undang berada sepenuhnya di bawah kehendak sang raja. Allah, di dalam paham Asy'ariyyah, jika demikian, dikesankan sebagai Tuhan yang otoriter, sewenang-wenang, tidak adil, dan bahkan jahat. Kecenderungan Asy'ariyyah yang berlebihan pada Kekuasaan Mutlak Allah ini juga mengantarkan mereka untuk beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan sepenuhnya hanya terikat pada takdir-Nya yang predeterministik; doktrin ini bertentangan dengan Mu'tazilah.

Agaknya, Mu'tazilah lebih rasional ketika menyatakan bahwa kebaikan dan keburukan bersifat rasional dan intrinsik, dan bahwa semua perintah Allah adalah benar adanya. Dia memerintahkan manusia berbuat yang benar karena itu memang benar adanya.

Namun, agaknya, mereka keliru ketika menyatakan bahwa sifat Benar-Nya terpisah dari Perintah-Nya. Ketika Dia memerintahkan manusia berbuat sesuatu yang benar, menurut mereka, benarnya perbuatan itu semata-mata ditentukan berdasarkan landasan-landasan objektif yang terdapat di dalam perbuatan itu sendiri, atau – menurut bahasa teknis filsafat – menurut prinsip-prinsip universal etika; dan bukan terutama karena itu Perintah-Nya, menurut mereka. Selanjutnya, kata mereka, itu karena aturan-aturan etika bukanlah hal yang berada di bawah Kekuasaan-Nya.

Kebalikan dari Asy'ariyyah, Mu'tazilah mematikan sifat Kekuasaan Allah, dan memberikan penekanan yang berlebih-lebihan kepada sifat Keadilan-Nya. Kepatuhan manusia kepada-Nya membuat-Nya tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengganjarnya dengan pahala dan surga. Tuntutan ini, meskipun rasional, adalah tuntutan berlebih-lebihan kepada-Nya.

Di dalam Etika Islam hendaknya harus dinyatakan bahwa satu-satunya tujuan manusia berbuat moral hanyalah untuk mematuhi Allah. Kepatuhan ini haruslah dicari dari dalam diri sendiri sebagai kehendak yang otonom, dan bukan dari luar hanya sebagai sarana atau tujuan untuk mencari kebahagiaan, pahala, dan surga. Untuk berbuat moral ini tentunya manusia harus memiliki kehendak bebas. Hanya dengan kehendak bebaslah manusia dapat dikenai tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya.

Perbuatan moral yang benar secara etis, di dalam Islam, harus juga dinyatakan bukan karena perbuatan itu semata-mata adalah Perintah Allah; atau, sebaliknya, semata-mata karena prinsip-prinsip universal, objektif, dan etis yang terdapat di dalam perbuatan itu sendiri *an sich*; melainkan memang karena kedua

alasan ini, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbuatan moral yang benar secara etis, di dalam Islam, haruslah dapat digambarkan seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama yang tidak mungkin dapat dipisahkan, seperti tidak mungkinnya memisahkan kedua sisinya. Pada satu sisi, suatu perbuatan moral itu benar karena itu memang perbuatan yang benar dan dapat diterima kebenarannya melalui akal pikiran; dan, pada sisi lainnya, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, tentulah Dia memerintahkan manusia untuk melakukannya.

Namun demikian, ketika Allah memerintahkan manusia berbuat yang benar, bukan berarti bahwa sifat Benar-Nya terpisah dari Perintah-Nya. Di sini harus dinyatakan bahwa Allah-lah yang menciptakan akal manusia untuk dapat menangkap kebenaran, Allah-lah juga yang menciptakan kebenaran, dan atas kebenaran yang diciptakan-Nya itulah Perintah-Nya sesuai dengan Kebenaran-Nya. Hanya dengan pemahaman demikianlah, kiranya, prinsip-prinsip universal etika dapat diselaraskan dengan Kehendak Allah mengenai mana perbuatan yang benar, dan mana yang salah secara etis. Mengenai kejelasan keduanya, benar dan salah di dalam perbuatan, Wahyu-Nya – yaitu Alquran dan Sunnah Nabi-Nya – tentu menjadi satu-satunya pedoman yang baik, bukan hanya bagi manusia yang berakal, tetapi juga sekaligus mau beriman.

Jika seorang muslim dihadapkan pada realitas empiris, terkadang, etika teoretis tidak sepenuhnya dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Ini terjadi karena adanya jarak antara wilayah “apa yang seharusnya” dan “apa adanya”. Di dalam realitas empiris, persoalan moral dilematis dapat saja terjadi, dan seorang muslim perlu memiliki sikap yang lebih realistis.

Kasus-kasus apapun, di dalam Islam, harus dapat diselesaikan melalui sumber Wahyu: Alquran dan Sunnah Nabi-Nya. Kedaruratan kasus moral pernah disinggung juga di dalam Alquran, dan dirumuskan kemudian di dalam *Usul al-Fiqh*. Namun, melalui etika Barat, kedaruratan kasus moral ini dapat dimengerti melalui kecenderungan Hedonisme, Epicureanisme, dan Utilitarianisme; atau, secara umum, kecenderungan pada Etika Teleologisme. Meski persoalan ini perlu penelitian lebih lanjut, barangkali, penelitian kecil ini dapat menjadi hipotesis yang bermanfaat, bahwa kaidah Ushul Fiqih: “*al-daruratu tubihu al-mahdurat*” (keadaan darurat memperbolehkan pelanggaran terhadap larangan) memiliki kecenderungan seperti itu.

## Kesimpulan

Dari uraian singkat ini dapat diketahui bahwa pemikiran, apapun namanya, termasuk filsafat, dan dalam hal ini etika, terutama bagi seorang muslim, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan menggunakan akal semata-mata. Penggunaan akal saja tidak cukup memberikan penjelasan yang memuaskan secara komprehensif. Dari sinilah dapat dimaklumi bahwa akal berhajat pada Wahyu. Melalui penelusuran multidisipliner, yang dalam hal ini adalah kajian Filsafat Barat sekular – dan di antaranya adalah Teologi dan Etikanya – dan kajian Keislaman – dan di antaranya melalui Ilmu Kalam, Filsafat Islam, dan Usul Fikih – dimengerti juga bahwa untuk membangun dasar yang kuat bagi landasan filsafatnya, Etika Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan berbagai kajian lain untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan-persoalannya. Sumber apapun di luar Islam tidak dapat dijadikan sebagai pedoman utama. Namun demikian, tidak berarti bahwa itu sama sekali tidak bermanfaat. Sumber luar dapat saja menjadi penjelasan, meskipun secara sekunder, dan bukan secara primer.

## DAFTAR PUSTAKA

- K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 2005)
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku III: Pengantar kepada Metafisika* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Dave Robinson dan Chris Garrat, *Mengenal Etika: For Beginners*, terj. Agus Salim dan Faizah Sari (Bandung: Mizan, 1998)
- Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika: sejak Zaman Yunani sampai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

- Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, terj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Badung: Mizan, 2003)
- Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002)
- Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2005)
- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 63.).
- Osman Bakar, *Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazi*, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1997)
- Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: LESFI, 2002)